

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA TENGAH PADA TAHUN 2013-2017

Oleh :

Destya Rachmawati

15313024

Email : rachmawatidestya@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze and determine the factors that influence economic growth in Central Java Province. The data used are panel data taken from all districts / cities in Central Java and taking samples of data in the provinces in 2013-2017. The data used in the data are GRDP Data in Expenditures, DAU, DAK and Inflation. The results of this study indicate that the DAU and Inflation variables greatly influence economic growth in Central Java Province while the DAK has no effect on economic growth in Central Java Province. The results of the calculations used are the results of Fixed Effect. Keywords: GRDP in Expenditures, DAU, DAK and Inflation.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah data panel yang diambil dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah dan mengambil sampel data di Provinsi pada tahun 2013-2017. Data yang digunakan dalam data tersebut adalah Data PDRB dalam Pengeluaran, DAU, DAK dan Inflasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel DAU dan Inflasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah sedangkan DAK tidak ada pengaruh dari pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penghitungan yang digunakan adalah hasil dari Fixed Effect.

Kata Kunci : PDRB dalam Pengeluaran, DAU, DAK dan Inflasi

PENDAHULUAN

Pengeluaran Pemerintah adalah suatu kebijakan fiskal untuk mengatur suatu jalannya perekonomian dengan menentukan besarnya penerimaan ataupun pengeluaran pemerintah pada tiap tahunnya. Yang dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk wilayah nasional. Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk wilayah daerah ataupun regional. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk menstabilkan harga, tingkat output ataupun kesempatan kerja dan untuk mendorong suatu pertumbuhan ekonomi. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang telah dialokasikan bertujuan untuk pemerataan dalam kemampuan keuangan dari daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam suatu pelaksanaan desentralisasi di dalam UU Nomer 33 Tahun 2004. Dana Alokasi Umum yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan Pendapatan Asli Daerah. Dana Alokasi Umum yang mempunyai tujuan untuk pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah.

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan telah di atur dalam UU 32/2004. Permasalahan dalam suatu Dana Alokasi Umum terletak pada perbedaan dengan cara pandang dari pemerintah pusat dan daerah. Bagi pusat Dana Alokasi Umum dijadikan sebagai instrument *horizontal imbalance*. Bagi daerah Dana Alokasi Umum yang dimaksud adalah untuk mendukung kecukupan pembiayaan daerah. Permasalahan timbul ketika daerah meminta Dana Alokasi Umum yang besar atau sesuai dengan kebutuhan pembiayaan daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai suatu kegiatan khusus berupa urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK ditetapkan setiap tahun dalam rancangan suatu APBN. Dasar hukum yang berlaku pada DAK yaitu di dalam Undang-Undang No.33 pada Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No.55 pada Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomer 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Keuangan ke Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomer 165/PMK.07/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah. Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus sedangkan pada tingkat inflasi menunjukkan tingkat presentase perubahan tingkat harga rata-rata tertimbang untuk barang dan

jasa dalam perekonomian suatu negara. Tingkat harga umum karena barang dan jasa yang ada di pasaran mempunyai jumlah dan jenis yang sangat beragam, dalam sebagian besar dari harga-harga barang tersebut yang selalu meningkatkan dan mengakibatkan terjadinya inflasi. Inflasi murni adalah inflasi yang terjadi sebelum adanya campur tangan dari pihak pemerintah. Yang berupa kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Dalam suatu laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode ke periode ataupun dari tahun ketahun.

Kajian Pustaka

Wibowo, B.E (2012), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan Tahun 1984 – 2009”. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan alat analisis regresi linier dengan metode *Ordinary Least square (OLS)*. menyatakan hasil penelitian bahwa variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan PDRB Kabupaten Grobogan pada derajat kepercayaan 95% serta variabel pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan PDRB Kabupaten Grobogan pada derajat kepercayaan 95%.

Wasingah, S (2018), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015”. Metode analisis yang dapat digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan analisis data panel. Mengatakan bahwa hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa variabel IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, dan variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi kelima variabel berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 99.92% sementara untuk sisanya yaitu 0.08% dijelaskan oleh variabel lainnya.

Luh Putu Rani Mayasari Ni Kadek Sinarwati, Gede Adi Yuniarta (2012), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng”. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan alat analisis Regresi Linier. Untuk memberikan bukti empiris dan mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Alokasi Belanja Modal dengan mempertimbangkan data yang dikumpulkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

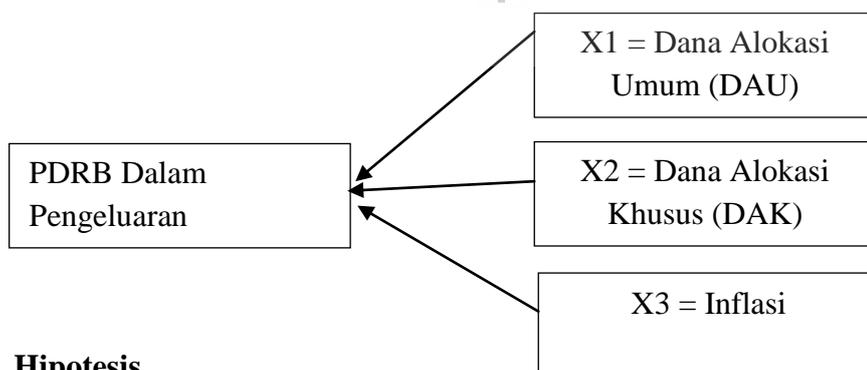
Daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dari tahun 2011-2013 berupa Laporan Realisasi Anggaran dengan sumber Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Buleleng. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat Pengaruh yang signifikan antara Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

Anis Setiyawati (2013), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran : Pendekatan Analisis Jalur”. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan alat analisis Regresi Linier. Pengaruh daerah asli pendapatan, DAU, DAK, dan belanja modal pada pertumbuhan ekonomi; untuk memeriksa secara langsung pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan pengangguran; dan untuk memeriksa secara tidak langsung efek pendapatan asli daerah, alokasi dana umum, alokasi dana khusus, dan belanja modal untuk kemiskinan dan pengangguran. Dalam penelitian yaitu biaya daerah dan anggaran pendapatan daerah pada tahun 2001 - 2005 di tiga puluh delapan kota. Hasil dari penelitian dengan regresi diindikasikan bahwa Pendapatan asli daerah dan alokasi generalfund memiliki efek langsung yang signifikan pada tingkat 0,01 pada pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi memiliki efek signifikan secara langsung pada tingkat 0,01 pada kemiskinan, dan pengangguran, pendapatan asli daerah dan alokasi dana umum secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan pengangguran.

Kerangka pemikiran

Dalam suatu kerangka pemikiran merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang berisikan tentang rangkuman dari seluruh bagian dasar teori dalam penelitian ini, dimana dalam kerangka penelitian ini dapat digambarkan dengan skema singkat yang mengenai proses penelitian yang telah dilakukan. Adapun skema tersebut adalah sebagai berikut :

Gambar Kerangka Pemikiran



Hipotesis

Dalam penelitian ini, analisis menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Variabel independen DAU diduga mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah pada Tahun 2013-2017
2. Variabel independen DAK diduga mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah pada Tahun 2013-2017
3. Variabel independen Inflasi diduga mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah pada Tahun 2013-2017

METODE PENELITIAN

Alat Analisis

Dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2017 menggunakan alat analisis *Data Panel Fixed Effect*. Variabel yang digunakan adalah DAU, DAK dan Inflasi. Dalam menganalisis menggunakan alat pengolahan data dengan menggunakan software *eviews 9*. Data yang digunakan adalah data *time series* selama 5 tahun terakhir yakni pada tahun 2013-2017 dan data *cross section* sebanyak 35 data yang mewakili Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hasil dari kombinasi dari data *time series* dan data *cross section* akan menghasilkan 175 observasi.

Penelitian ini menggunakan asumsi *fixed effect model* (FEM) dalam pertimbangan pokok yang dihasilkan oleh *cross section* pada penelitian ini tidak akan diambil berdasarkan acak dan jumlah observasi yang telah dilakukan hanya 175 observasi. Persamaan model regresi data panel dapat dirumuskan dalam model sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi dalam sektor Pengeluaran}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{DAU}_{it} + \beta_2 \text{DAK}_{it} + \beta_3 \text{Inflasi}_{it} + U_{it}$$

Keterangan :

Y = Pertumbuhan Ekonomi dalam sektor pengeluaran

$\beta_0 - \beta_4$ = Koefisien Intersep

i = Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

t = waktu (tahun 2013-2017)

Ut = variabel pengganggu

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengeluaran Pemerintah adalah suatu kebijakan fiskal untuk mengatur suatu jalannya perekonomian dengan menentukan besarnya penerimaan ataupun pengeluaran pemerintah pada tiap tahunnya. Yang dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk wilayah nasional. Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk wilayah daerah ataupun regional. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk menstabilkan harga, tingkat output ataupun kesempatan kerja dan untuk mendorong suatu pertumbuhan ekonomi.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang telah dialokasikan bertujuan untuk pemerataan dalam kemampuan keuangan dari daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam suatu pelaksanaan desentralisasi di dalam UU Nomer 33 Tahun 2004. Dana Alokasi Umum yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan Pendapatan Asli Daerah. Dana Alokasi Umum yang mempunyai tujuan untuk pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah. Sehingga perbedaan antar daerah yang maju dan daerah yang belum berkembang dapat di perkecil (Indarti dan Sugiartiana, 2012). Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan telah di atur dalam UU 32/2004. Dana Alokasi Umum merupakan dana hibah (*grants*) yang kewenangan pengguna diserahkan penuh kepada Pemda penerima (Arwati dan Hadiati, 2013). Permasalahan dalam suatu Dana Alokasi Umum terletak pada perbedaan dengan cara pandang dari pemerintah pusat dan daerah. Bagi pusat Dana Alokasi Umum dijadikan sebagai instrument *horizontal imbalance*. Bagi daerah Dana Alokasi Umum yang dimaksud adalah untuk mendukung kecukupan pembiayaan daerah. Permasalahan timbul ketika daerah meminta Dana Alokasi Umum yang besar atau sesuai dengan kebutuhan pembiayaan daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai suatu kegiatan khusus berupa urusan daerah dan sesuai

dengan prioritas nasional. DAK ditetapkan setiap tahun dalam rancangan suatu APBN. Dasar hukum yang berlaku pada DAK yaitu di dalam Undang-Undang No.33 pada Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No.55 pada Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomer 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Keuangan ke Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomer 165/PMK.07/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah.

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus sedangkan pada tingkat inflasi menunjukkan tingkat presentase perubahan tingkat harga rata-rata tertimbang untuk barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara. Tingkat harga umum karena barang dan jasa yang ada di pasaran mempunyai jumlah dan jenis yang sangat beragam, dalam sebagian besar dari harga-harga barang tersebut yang selalu meningkatkan dan mengakibatkan terjadinya inflasi. Inflasi murni adalah inflasi yang terjadi sebelum adanya campur tangan dari pihak pemerintah. Yang berupa kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Dalam suatu laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode ke periode ataupun dari tahun ketahun.

HASIL INTERPRETASI DAN PEMBAHASAN

Hasil Fixed Effect

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: PDRB?

Method: Panel Least Squares

Date: 04/27/19 Time: 12:30

Sample: 2013 2017

Included observations: 50

Cross-sections included: 2

Total pool (unbalanced) observations: 70

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1261.047	1877.958	-0.671499	0.5042
DAU?	0.714074	0.091796	7.778898	0.0000
DAK?	-1.47E-08	7.12E-08	-0.206651	0.8369
INFLASI?	4.66E-08	2.27E-08	2.050623	0.0443

Sumber : data diolah

Pertumbuhan Ekonomi dalam sektor Pengeluaran_{it} = $4.071100 - 5.33E-18 \text{ DAU}_{it} + 7.20E-18 \text{ DAK}_{it} + 0.012391 \text{ IHK}_{it} - 0.047407 \text{ Inflasi}_{it} + U_{it}$

1. Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan uji signifikansi DAU, menunjukkan probabilitas value sebesar $0.0000 < \alpha = 5\%$, maka menolak H_0 . Berarti secara statistik menunjukkan bahwa variabel DAU berpengaruh signifikan terhadap variable pertumbuhan ekonomi dalam sector pengeluaran di Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah. Koefisien DAU sebesar 0,714074 menunjukkan DAU mengalami kenaikan sebesar 1 juta rupiah maka Pertumbuhan Ekonomi dalam sektor Pengeluaran akan mengalami kenaikan sebesar 0,714074%.

2. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan uji signifikansi DAK, menunjukkan probabilitas value sebesar $0.8369 > \alpha = 5\%$, maka gagal menolak H_0 . Berarti secara statistik menunjukkan bahwa variabel DAK tidak berpengaruh terhadap variable pertumbuhan ekonomi dalam sector pengeluaran di Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah. Koefisien DAK sebesar $-1.47E-08$ menunjukkan DAK mengalami kenaikan sebesar 1 juta rupiah maka tidak mempengaruhi perubahan Pertumbuhan Ekonomi dalam sektor Pengeluaran. Hal ini

disebabkan karena dana dialokasikan kegiatan-kegiatan yang tidak meningkatkan produksi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

3. Inflasi

Berdasarkan uji signifikansi Inflasi, menunjukkan probabilitas value sebesar $0.0443 < \alpha = 5\%$, maka menolak H_0 . Berarti secara statistic menunjukkan bahwa variable Inflasi berpengaruh signifikan terhadap variable pertumbuhan ekonomi dalam sector pengeluaran di Provinsi Jawa Tengah. Koefisien Inflasi sebesar $4.66E-08$ menunjukkan Inflasi mengalami kenaikan sebesar 1% maka Pertumbuhan Ekonomi dalam sector Pengeluaran akan mengalami kenaikan sebesar $4.66E-08\%$. Inflasi itu sendiri berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang artinya ketika inflasi itu meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan tetap tinggi. Bahwa hasil regresi berpengaruh positif sedangkan hasil hepotesis berpengaruh negatif. Hal ini disebabkan kenaikan inflasi mempengaruhi motivasi produsen untuk meningkatkan produksi untuk pertumbuhan ekonomi yang meningkat.

Kesimpulan

Pertumbuhan ekonomidi Provinsi Jawa Tengah sangat signifikan pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Inflasi. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak signifikan. Inflasi itu sendiri berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang artinya ketika inflasi itu meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan tetap tinggi. Pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat

di Provinsi Jawa Tengah. Di Provinsi Jawa Tengah memiliki kekayaan alam terbesar adalah alam pertanian, perikanan dan lain sebagainya. Dengan bentangan luas sawah tak sebanding luas dengan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam tujuan tersebut dapat mengurangi kemiskinan serta menghilangkan kesenjangan dengan membangun pabrik yang dapat memberikan dampak signifikan untuk menghadapi kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah yaitu dalam kisaran pengeluaran sebesar 4-6 persen. Pada Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2017. Pertumbuhan ekonomi yang tertinggi pada tahun 2015 sebesar 5,96% dan pertumbuhan ekonomi yang paling rendah pada tahun 2014 sebesar 4,07%. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Tapi pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah lebih tinggi pada tingkat Provinsi Jawa Tengah ataupun Nasional.

Implikasi

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya untuk memfokuskan pada satu Provinsi Jawa Tengah Untuk penelitian selanjutnya disarankan melakukan penelitian dengan populasi dan sampel se Jawa Tengah

Daftar Pustaka

- Bank Indonesia. (2009). Permintaan dan Penawaran. Diambil 10 Januari 2019 dari <https://www.bi.go.id/>
- Badan Pusat Statistik. (2018). Inflasi Provinsi Jawa Tengah 2013-2017. Diambil 18 Januari 2019 dari <https://jateng.bps.go.id/>
- _____. (2013). Statistik Keuangan Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2013. Diambil 12 April 2019 dari <https://jateng.bps.go.id/>
- _____. (2014). Statistik Keuangan Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2014. Diambil 12 April 2019 dari <https://jateng.bps.go.id/>
- _____. (2015). Statistik Keuangan Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2015. Diambil 12 April 2019 dari <https://jateng.bps.go.id/>
- _____. (2016). Statistik Keuangan Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2016. Diambil 12 April 2019 dari <https://jateng.bps.go.id/>
- _____. (2017). Statistik Keuangan Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2017. Diambil 12 April 2019, dari <https://jateng.bps.go.id/>
- _____. (2018). PDRB Dalam Pengeluaran Provinsi Jawa Tengah 2013-2017. Diambil 12 November 2018 dari <https://jateng.bps.go.id/>
- _____. (2018). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Banjarnegara 2013-2017. Diambil 10 Agustus 2018 dari <https://banjarnegarakab.bps.go.id/>
- _____. (2017). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Banyumas 2013-2017. Diambil 12 November 2018 dari <https://banyumaskab.bps.go.id/>
- _____. (2017). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Batang 2013-2017. Diambil 12 November 2018 dari <https://batangkab.bps.go.id/>
- _____. (2017). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Blora 2013-2017. Diambil 12 November 2018 dari <https://blorakab.bps.go.id/>
- _____. (2019). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Boyolali 2013-2017. Diambil 26 Januari 2019 dari <https://boyolalikab.bps.go.id/>
- _____. (2019). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Brebes 2013-2017. Diambil 12 November 2018 dari <https://brebeskab.bps.go.id/>

- _____. (2018). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Cilacap 2013-2017. Diambil 12 November 2018 dari <https://cilacapkab.bps.go.id/>
- _____. (2018). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Demak 2013-2017. Diambil 12 November 2018 dari <https://demakkab.bps.go.id/>
- _____. (2018). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Grobogan 2013-2017. Diambil 12 November 2018 dari <https://grobogankab.bps.go.id/>
- _____. (2018). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Jepara 2013-2017. Diambil 12 November 2018 dari <https://jeparakab.bps.go.id/>
- _____. (2018). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Karanganyar 2013-2017. Diambil 12 November 2018 dari <https://karanganyarkab.bps.go.id/>
- _____. (2018). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Kebumen 2013-2017. Diambil 15 November 2018 dari <https://kebumenkab.bps.go.id/>
- _____. (2017). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Kendal 2013-2017. Diambil 23 November 2018 dari <https://kendalkab.bps.go.id/>
- _____. (2019). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Klaten 2013-2017. Diambil 23 November 2018 dari <https://klatenkab.bps.go.id/>
- _____. (2017). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Kudus 2013-2017. Diambil 29 Oktober 2018 dari <https://kuduskab.bps.go.id/>
- _____. (2018). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Magelang 2013-2017. Diambil 25 November 2018 dari <https://magelangkab.bps.go.id/>
- _____. (2017). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Pati 2013-2017. Diambil 25 November 2018 dari <https://patikab.bps.go.id/>
- _____. (2017). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Pekalongan 2013-2017. Diambil 25 November 2018 dari <https://pekalongankab.bps.go.id/>
- _____. (2018). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Pemasang 2013-2017. Diambil 25 November 2018 dari <https://pemasangkab.bps.go.id/>
- _____. (2018). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Purbalingga 2013-2017. Diambil 25 November 2018 dari <https://purbalinggakab.bps.go.id/>
- _____. (2018). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Purworejo 2013-2017. Diambil 25 November 2018 dari <https://purworejokab.bps.go.id/>

- _____. (2018). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Rembang 2013-2017. Diambil 15 Desember 2018 dari <https://rembangkab.bps.go.id/>
- _____. (2017). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Semarang 2013-2017. Diambil 15 Desember 2018 dari <https://semarangkab.bps.go.id/>
- _____. (2017). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Sragen 2013-2017. Diambil 15 Desember 2018 dari <https://sragenkab.bps.go.id/>
- _____. (2018). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Sukoharjo 2013-2017. Diambil 15 Desember 2018 dari <https://sukoharjokab.bps.go.id/>
- _____. (2017). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Tegal 2013-2017. Diambil 15 Desember 2018 dari <https://tegalkab.bps.go.id/>
- _____. (2017). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Temanggung 2013-2017. Diambil 19 Desember 2018 dari <https://temanggungkab.bps.go.id/>
- _____. (2018). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Wonogiri 2013-2017. Diambil 19 Desember 2018 dari <https://wonogirikab.bps.go.id/>
- _____. (2017). PDRB Dalam Pengeluaran Kab. Wonosobo 2013-2017. Diambil 19 Desember 2018 dari <https://wonosobokab.bps.go.id/>
- _____. (2017). PDRB Dalam Pengeluaran Kota Magelang 2013-2017. Diambil 24 Desember 2018 dari <https://magelangkota.bps.go.id/>
- _____. (2018). PDRB Dalam Pengeluaran Kota Pekalongan 2013-2017. Diambil 24 Desember 2018 dari <https://pekalongankota.bps.go.id/>
- _____. (2018). PDRB Dalam Pengeluaran Kota Salatiga 2013-2017. Diambil 30 Desember 2018 dari <https://salatigakota.bps.go.id/>
- _____. (2018). PDRB Dalam Pengeluaran Kota Semarang 2013-2017. Diambil 30 Desember 2018 dari <https://semarangkota.bps.go.id/>
- _____. (2017). PDRB Dalam Pengeluaran Kota Surakarta 2013-2017. Diambil 30 Desember 2018 dari <https://surakartakota.bps.go.id/>
- _____. (2017). PDRB Dalam Pengeluaran Kota Tegal 2013-2017. Diambil 30 Desember 2018 dari <https://tegalkota.bps.go.id/>

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan. (2016). Dana Alokasi Umum 2013-2017. Diambil 04 Januari 2019 dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/danaalokasiumum>

_____. (2016). Dana Alokasi Khusus 2013-2017. Diambil 04 Januari 2019 dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/danaalokasiumum>

Luh Putu Rani Mayasari Ni Kadek Sinarwati(2012). “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal PadaPemerintah Kabupaten Buleleng”. Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis,Denpasar Bali

Setiyawati (2013). “Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran : Pendekatan Analisis Jalur”. Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis,Universitas Diponegoro Semarang. Semarang.

Wasingah (2018). “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015”. Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi,Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.

Wibowo (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan Tahun 1984 – 2009”). Fakultas Ekonomi dan Bisnis,Universitas Diponegoro Semarang. Semarang.

Widarjono,A. (2007).Ekonometrika Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis. Edisi Kedua.Yogyakarta : Fakultas Ekonomi UIL.

Todaro,Michael P.(2000). Pembangunan Ekonomi.Jakarta : PT. Bumi Aksara